

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Pada tahun 1991 Pecahnya Uni Soviet, banyak bagian bagian wilayah darinya membentuk negara-negara kecil baru, namun secara umum masih mempunyai kawasan yang dominan yaitu Rusia. Rusia mulai membenahi kondisi yang ada didalam negerinya untuk bisa kembali aktif dan mendominasi dalam politik internasional. Rusia merumuskan kembali semua bentuk kebijakan luar negerinya. Keinginan Rusia tersebut untuk kembali mencapai kejayaan masa lalunya.

Rusia adalah Negara terbesar di Dunia yang terletak di sebelah Timur Eropa dan Utara Asia. Rusia merupakan Negara bagian terbesar pada masa Uni Soviet dan merupakan pewaris utamanya, Rusia mewarisi sebagian besar jumlah penduduk, ekonomi dan persenjataan Uni Soviet. Rusia berusaha untuk menjadi negara adikuasa sejak Uni Soviet runtuh walaupun sekarang belum bisa terwujud sepenuhnya. Untuk mewujudkan negara Adikuasa salah satu cara yang dilakukan Rusia adalah dengan menjadi “Polisi Dunia” guna memperluas pengaruh politik nya ke negara-negara lain, sehingga keseimbangan kekuasaan (*Balance of Power*) di level tingkat internasional dapat tercapai.

Hubungan antara Rusia dan Suriah yang sudah terjalin sejak masa Uni Soviet dan diperkuat semenjak Presiden Suriah Hafez Al-assad dan diganti oleh anaknya yaitu Basaar Al-assad. Pada masa Pemerintahan Uni soviet Rusia memiliki pangkalan Militer di Tartus Suriah, Uni Soviet merupakan negara yang pertama kali mengakui

kemerdekaan Suriah dan Suriah juga negara yang memperkuat pengaruh Uni Soviet di Timur Tengah.

Konflik di Suriah, Bermula sejak terjadinya banyak konflik di beberapa Negara di Timur Tengah yang dikenal dengan istilah arab spring, Awal mula perang di suriah ini dilatar belakangi oleh kekecewaan rakyat Suriah terhadap rezim Bashar Asaad yang otoriter dan sewenang-wenang terhadap rakyatnya. dimana rakyat tidak lagi terpenuhi aspirasinya. Pemerintah Suriah dinilai sebagai bagian dari rezim diktator yang menindas rakyat dan malah membuat rakyatnya menderita. Sehingga, hal ini menimbulkan tindakan protes untuk menurunkan pemerintahan dalam bentuk demonstrasi turun ke jalan, litrasi media, dan cara- cara militer, ditempuh oleh oposisi untuk mencapai keinginan mereka.

Proses penurunan rezim Bashar Al-Assad yang telah dimulai sejak awal 2006, proses penurunan ini sudah menghasilkan korban ratusan nyawa baik dari sipil maupun dari pemerintahan. Apalagi timbulnya isu baru baru ini yang mengklaim penggunaan senjata kimia berbahaya yang digunakan pihak pemerintah Suriah untuk melawan pihak oposisi yang mengakibatkan banyak korban. (agasty, 2013)

Puncaknya Pada tahun 2011 Rakyat Suriah melakukan revolusi (perlawanan) terhadap rezim Asaad. Aksi protes ini menuntut penghentian Rezim Bashar Al-Assad yang dianggap sebagai diktator, diterapkannya sistem multipartai, dan juga kebebasan yang lebih bagi rakyat, dan juga pemberhentian undang-undang darurat yang telah diterapkan sejak 1963. Meski telah dilakukan upaya-upaya reformasi oleh Bashar Al-Assad, namun itu dianggap tidak cukup dan terlambat. Kini rakyat Suriah hanya menginginkan penggulingan rezim Bashar Al-Assad dan pengangkatan pemerintah yang sama sekali baru berdasarkan pemilu yang demokratis.

Muncul nya pemberontakan ISIS yang merupakan organisasi fundamental Islam yang didirikan pada bulan april tahun 2013 Organisasi ini sudah ada sejak lama namun baru dideklarasikan pada tahun 2013, organisasi ini memiliki empat faham ideologi sekaligus, masing-masing yaitu Islamism Sunni (Sunni Islam), Salafist Jihadism (Jihad Salafiah). Worldwide Caliphate (Kekhalifahan Islam Internasional) dan Anti Shiaism (Anti Mazhab Syiah). Dari sisi kepemimpinannya, ISIS tidak lepas dari peranan tiga tokoh pemimpin, yaitu Abu Bakar Al-Baghdadi, Abu Oemar al-Shisani dan Abu Mohammad al-Adnani. (SyriaIraqTheIslamicStateMilitantGroup, 2014)

ISIS (islamic state in Iraq and syam) merupakan kelompok jihad utama yang memerangi pasukan pemerintah Suriah dan membangun kekuatan militer di Irak, tujuan ISIS yakni untuk mendirikan kekhalifan islam serta menghidupkan kembali syariat islam atau daulah islamiyah. Kelompok ini berhasil membangun kekuatan militer, terbukti pada tahun 2013, mereka menguasai kota Raqqa di Suriah yang merupakan ibukota provinsi utama dan dikuasai pemberontak. Mereka menguasai wilayah yang termasuk kota-kota besar dan meliputi satu per tiga total wilayah Irak dan Suriah; mereka memiliki pasukan militer dan keamanannya sendiri, pemerintahan berdiri sendiri yang mengatur kehidupan sehari-hari, mulai sekolah, sarana-sarana dan sistem peradilan berbasis hukum syariah. (Antaraneews, 2015)

Mereka berperang karena hendak membela agama Islam melawan agama Syiah, dan muncul ISIS disini untuk melawan syiah, ISIS (Islamic State Iraq and Syam) Sesungguhnya ISIS menetapkan musuh utamanya adalah Syiah yang dianggap bukan Islam tapi justru ribuan Muslim, baik Sunni ataupun Syiah dibunuh oleh mereka di Suriah dan Irak. (SyriaIraqTheIslamicStateMilitantGroup, 2014)

Dalam pemberontakan ini, Pemerintah Suria melakukan serangan yang sengit kepada para pemberontak dengan menggunakan kekuatan Militer Suriah, Pertumpahan darah kian meningkat dengan tewasnya para pejuang pembebasan Suriah dan warga sipil, pada tahun 2011 mengingat terhitung kurang lebih 750 korban jiwa akibat perang sipil antara rezim pemerintahan dan pihak oposisi. (AntaraneWS(online), 2012) .

Menanggapi hal ini, masyarakat internasional, khususnya PBB, tidak tinggal diam, dimana PBB Memiliki tugas sebagai polisis dunia yang mengharuskan Dewan Keamanan PBB harus sigap mengambil dan memutuskan kebijakan dalam menyelesaikan konflik atau segala sesuatu yang dapan mengancam keamanan dunia. Mereka memberikan respons terhadap konflik internal yang terjadi di Suriah. Tindakan Presiden Suriah Bashar al-Assad menyerang oposisinya dianggap sebagai kejahatan yang harus dihentikan. Dewan keamanan mengecam tindakan tersebut berulang kali dan menghimbau al-Assad untuk menghentikan serangan pada rakyat yang pro-demokrasi.

Dewan keamanan sendiri telah melakukan pertemuan yang membahas masalah ini. Selain Dewan Keamanan, Liga Arab juga berinisiatif untuk menghentikan krisis di Suriah dengan mengeluarkan resolusi. Resolusi Liga Arab ini didukung oleh Dewan Keamanan. Resolusi tersebut mencerminkan kecaman terhadap segala bentuk kejahatan yang telah dilakukan oleh rezim Al-Assad pada rakyatnya. Kecaman mereka beralasan bahwa Pemerintah Suriah telah melakukan kekerasan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kepada penduduk sipil. (AntaraneWS(online), 2012)

Pada 2011 PBB berencana menurunkan tim khusus ke Suriah dalam rangka mendukung implementasi dari resolusi Dewan Keamanan PBB dan menjamin adanya

gencatan senjata antara rezim pemerintahan dan oposisi. Namun, dalam proses menuju pemberlakuan resolusi ini ditemukan banyak hambatan, sehingga resolusi ini tidak dapat diimplementasikan untuk menghentikan konflik yang terjadi di Suriah. Hal ini dikarenakan oleh syarat diberlakukannya sebuah resolusi dari Dewan Keamanan PBB adalah dengan memperoleh kesepakatan sekurang-kurangnya sembilan anggota tidak tetap dan harus disepakati oleh seluruh anggota tetap (Cina, Inggris, Rusia, Prancis, dan Amerika Serikat). Hal ini tertera dalam Piagam PBB Pasal 27 ayat 3. Kemudian dalam konflik Suriah, seperti yang telah dibahas sebelumnya, ditemukan kasus dimana Rusia dan Cina mengeluarkan hak vetonya, sehingga berdampak pada penyelesaian konflik Suriah yang terhambat karena dibatalkannya resolusi tersebut. (Kantor Berita Rakyat, 2012)

Pada tahun 2011 ini Rusia memberikan dukungannya kepada pihak pemerintah Bassar al-Assad. Rusia sebagai negara yang memiliki hak veto menjatuhkan hak nya di dewan keamanan PBB untuk menolak draft resolusi yang berisi rancangan intervensi militer ke wilayah Suriah.

Tidak diragukan jika konflik di Timur Tengah banyak menyorot perhatian internasional yang ingin membantu menyelesaikan konflik yang ada di Timur Tengah. Konflik di Suriah banyak menyorot perhatian Internasional, seperti negara Prancis, Iran, Rusia, China, Turki, Amerika Serikat dan lainnya. Namun Tidak semua negara yang ikut melakukan intervensi dalam konflik Suriah ini ikut membela pihak oposisi yang bertujuan ingin meng kudeta presiden Bassar al-Assad, akan tetapi dipihak lain seperti, Rusia, China dan Iran mereka mendukung pihak pemerintahan Bassar Al-assad.

Konflik internal tersebut telah memancing intervensi dari banyak pihak termasuk pihak Barat dan juga oposisinya. Pihak Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat, berdasarkan sejarah dan kebijakan luar negerinya di Semenanjung Arab menginginkan Suriah yang demokratis dengan menggulingkan rezim Assad. Namun, berbeda dengan Rusia dan Cina yang juga memainkan politik yang sesuai dengan kepentingannya. Dengan banyaknya campur tangan yang terjadi, maka kompleksitas krisis di Suriah saat ini merupakan hasil dari konversi banyak kepentingan.

Pada tanggal 30 September 2015 yang lalu (dimulainya operasi militer), Rusia memutuskan untuk melakukan penyerangan udara terhadap ISIS dan kelompok-kelompok perlawanan yang lain di wilayah Suriah. Rusia mengirimkan sekitar lebih 30 Jet tempur serta 15 helikopter dan persenjataan-persenjataan canggih lainnya. Penyerangan ini dilakukan setelah Bashar Asad meminta Rusia untuk ikut membantu pasukan Suriah melawan gempuran dari kelompok perlawanan Suriah, dimana ISIS dapat mengancam perdamaian dunia, serta rusia mendapat permintaan sah dari suriah untuk membantu melawan ISIS. (rusia membantu suriah, 2015)

Namun Tindakan Rusia di Suriah mendapat banyak kecaman dari Negara Barat, terutama Amerika Serikat, Karena Tindakan yang dilakukan Rusia merupakan pelanggaran HAM (*hak asasi manusia*) dimana Tindakan ini banyak memakan korban yang Tidak bersalah dan mendukung Rezim Pemerintahan yang Diktator dimana Rakyat Suriah sendiri menginginkan Pemerintahan yang Baru. (sindonews, 2015).

B. pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian yang sudah di paparkan di atas, maka Rumusan masalah yang bisa di ambil adalah **“Mengapa Rusia membantu pemerintahan Bashar Al-assad dalam melawan ISIS?”**

C. Kerangka Pemikiran

Sebagai pedoman bagi penulis untuk mempermudah melakukan kegiatan penelitian dan analisis data yang ada serta mencegah terjadinya distorsi pembahasan objek penelitian dan meluasnya pembahasan kearah yang tidak signifikan, maka penulis mencoba mengajukan kerangka berpikir sebagai acuan dalam penelitian ini.

kerangka pemikiran merupakan teori dan pendapat para ahli yang tentunya berkorelasi dengan objek yang diteliti serta dapat memberikan dasar pemikiran yang kuat dalam suatu penelitian hingga di akui kebenarannya dalam mendukung suatu hipotesis.

Teori Kebijakan Politik Luar negeri

Politik luar negeri itu pada dasarnya merupakan “action theory”, atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Pada definisi lainnya juga disebutkan bahwa, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks

dalam negeri dan luar negeri serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya. (Yani, 2009)

“Tindakan luar negeri dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri yakni kondisi politik dalam negeri suatu negara, situasi ekonomi dan militer suatu negara dan konteks internasional” (D.coplin, 2003)

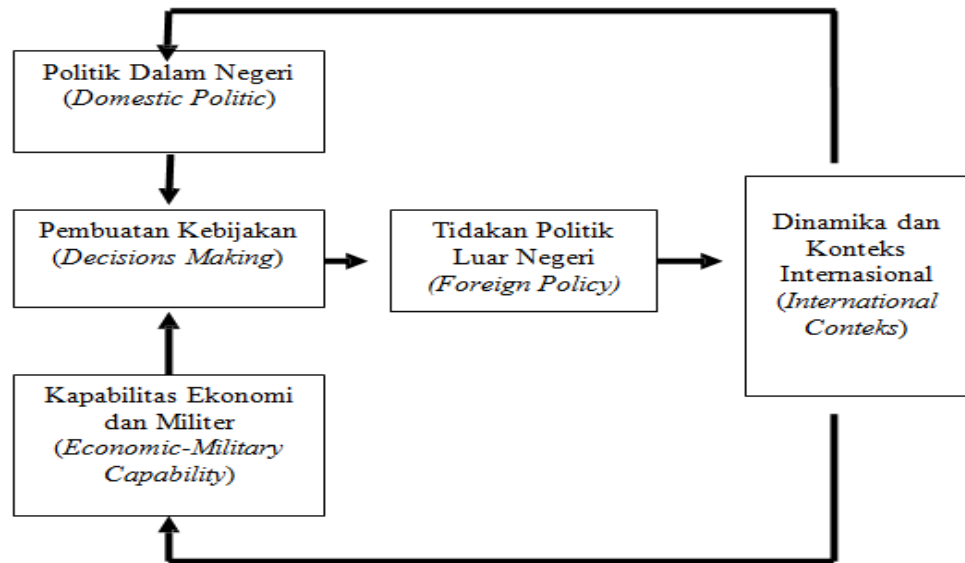
Menurut William D.Coplin, Teori pengambilan keputusan Luar Negeri atau Foreign policy, Yaitu :

“ apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar jika menganggap bahwa para Pemimpin negara (para pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan. (D.coplin, 2003) Tetapi sebaliknya, tindakan politik luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri :

- a. Kondisi politik dalam negeri yang meliputi keadaan atau situasi di dalam negeri yang akan membuat keputusan, yaitu situasi Politik di dalam Negri itu yang berkaitan dengan keputusan tersebut.
- b. Situasi Ekonomi dan Militer di negara tersebut, termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan dan keamanan.
- c. Konteks Internasional (situasi di negara yang menjadi tujuan politik luar negeri), serta pengaruh dari negara-negara lain yang relavan dengan permasalahan yang dihadapi.

Gambar I

Skema Pembuatan Kebijakan Luar Negeri



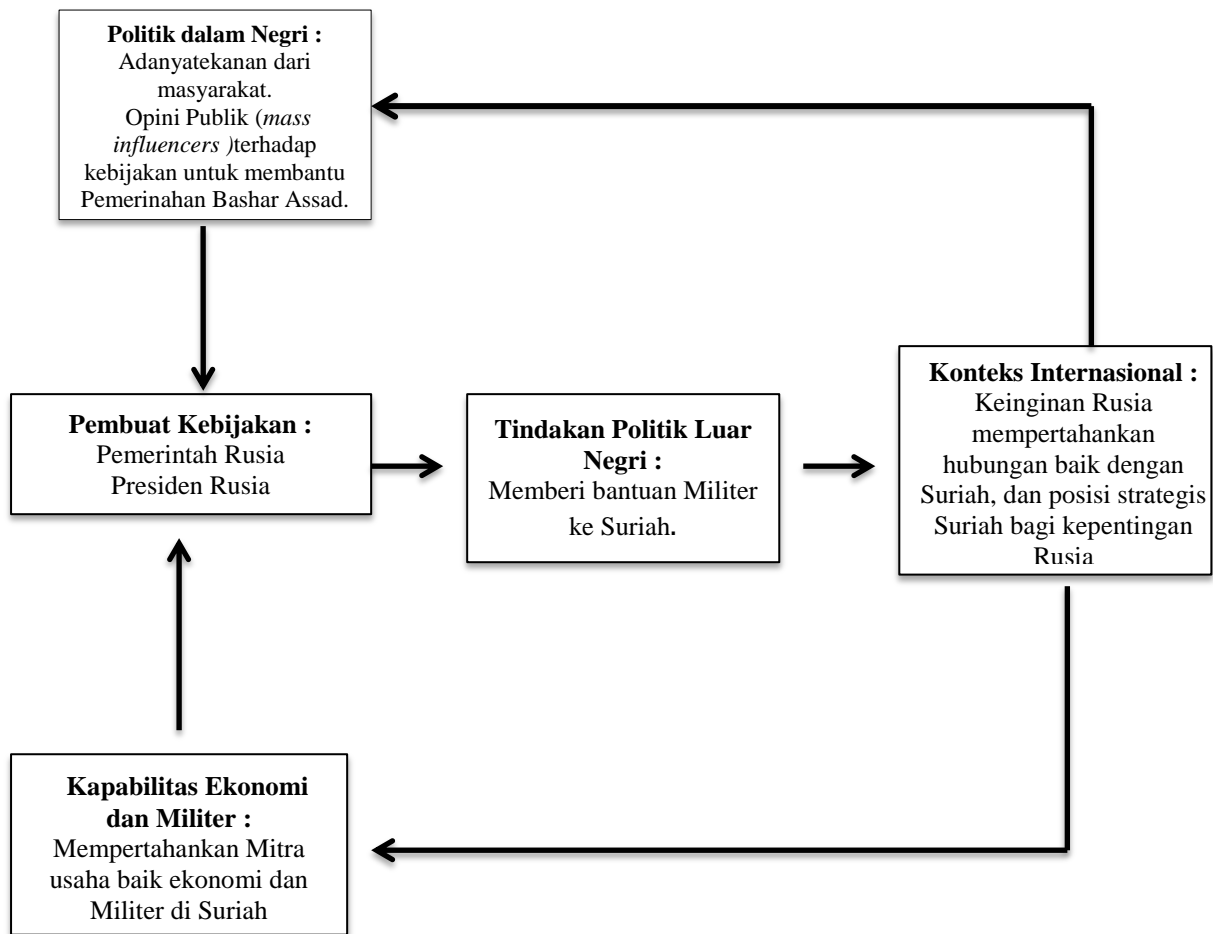
Sumber : Teori Pembuatan Kebijakan Luar negeri yang diungkapkan Wilian D, Coplin,

(D.coplin, 2003)

Dari Gambar diatas dapat dilihat bagaimana sebuah keputusan Luar Negeri dipengaruhi oleh berbagai kondisi dalam Negeri (Politik, Ekonomi dan Militer) dan Konteks internasional. akan tetapi pengambil keputusan luar negeri dimana dalam konteks ini presiden sebagai penganban tugas dan bisa juga disebut sebagai aktor individu dan aktor rasional, dimana dalam model ini politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan-tindakan aktor rasional. Penghitungan secara rasional, untung-rugi dalam Politik dalam Negeri Pengambilan keputusan Kondisi Ekonomi dan Militer Tindakan Politik Luar Negeri Konteks Internasional suatu produk tindakan politik suatu negara di masalalu, kini dan mendatang.

Penulis akan menggambarkan aplikasi teori William D.Coplin tersebut sebagai berikut:

Gambar II



Dari gambaran aplikasi teori tersebut dapat dilihat bahwa Kontek Internasional itu mempengaruhi sifat atau perilaku yang diambil dari sebuah Negara. Dari banyak penjelasan tentang mengapa Negara berperilaku seperti yang dilakukannya, tidak ada yang lebih sering diberikan daripada yang fokuskan pada Konteks Internasional. Secara tradisional para Analis telah menekankan bahwa sifat system internasional dan hubungan antara Negara dengan kondisi-kondisi dalam system itu menentukan bagaimana Negara itu akan berperilaku. (D.coplin, 2003).

Dari gambaran aplikasi diatas, dalam Konteks Internasional Adanya Hubungan baik antara Rusia dan Suriah yang sudah berlangsung cukup lama, dalam dunia internasional, kawasan Timur Tengah ini memang rawan terjadinya konflik, baik antar Negeranya maupun konflik yang terjadi dalam satu Negara, adanya

konflik yang terjadi di Suriah tentang pemberontakan terhadap rezim Bashar Al-assad menjadi sorotan dalam Dunia Internasional, dimana dalam Konflik ini banyak pihak yang ingin meakukan intervensi ke Suriah, seperti pihak Amerika Serikat yang mendukung penggulingan Rezim Bashar Al-assad dan menginginkan Suriah menjadi Negara yang demokratis.

Dalam hal ini tentunya Rusia tidak tinggal diam untuk mencegah segala bentuk intervensi ke Negara yang sangat strategis itu. Melihat situasi yang tidak stabil di Suriah, dimana adanya para pemberontak Islam pegaris keras dan Rakyat suriah yang menginginkan Revolusi dan penggulingan Rezim Bashar Al-assad dari Pemerintahannya. Politik dalam Negeri Rusiah merasa terancam dengan adanya konflik di Suriah yang ingin menerunkan Pemerintahan Bashar Al-assad yang dipimpin oleh para pemberontak ISIS (*Islamic state in Iraq and syam*). dimana Pemerintahan Bashar Al-assad bisa saja runtuh dan digantikan oleh pihak teroris yang akan menguasai Suriah, dan sudah diketahui bahwa telah ribuan warga Muslim Rusia yang direkrut menjadi anggota ISIS. Ini menjadi ancaman bagi Rusia sewaktu-waktu warga negaranya yang menjadi anggota ISIS akan menyebarluaskan pengaruhnya hingga ke Rusia.

Pembuatan Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Rusia presiden Vladimir Putin dimana Politik dalam Negri Rusia merasa terancam dengan kehadiran ISIS (*Islamic state in Iraq and syam*) di Suriah, mengingat Rusia merupakan Negara yang memiliki banyak penduduk Musilim dan mayoritas beragama Sunni yang sama seperti ISIS. Adanya kegelisahan dari rakyat akan peluasan paham ISIS hingga ke Rusia dan memicu terjadinya konflik di Negara Rusia.

Dalam kapabilitas Ekonomi dan Militer dimana Rusia mempunyai kerjasama Ekonomi dan Militer dengan Suriah, dalam hal ini Rusia akan

mempertahankan mitra perdagangan antara keduanya, Tindakan Politik Luar Negeri dimana Rusia memberikan dukungan militer yang kuat ke Suriah dalam melawan ISIS (*Islamic state in Iraq and syam*). Dan Pada tahun 2011 Rusia memberikan dukungannya kepada pihak pemerintah Bassar al-Assad. Rusia sebagai negara yang memiliki hak veto menjatuhkan hak nya di dewan keamanan PBB untuk menolak draft resolusi yang berisi rancangan intervensi militer ke wilayah Suriah dn pada tanggal 30 September 2015 yang lalu (dimulainya operasi militer), Rusia memutuskan untuk melakukan penyerangan udara terhadap ISIS dan kelompok-kelompok perlawanan yang lain di wilayah Suriah.

Dukungan Rusia terhadap Pemerintahan Bashar Al-assad ini tidak lepas dari adanya kepentingan-kepentingan Rusia di Suriah. Adanya kerjasama Ekonomi dan Militer antar kedua Negara, serta mencegahnya peluasan islam pegaris keras hingga ke Rusia yang dapat mengancam keamanan Nasional Rusia.

D. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan penulis dalam penelitian ini adalah berdasarkan latar belakang dan teori di atas, maka dapat di ambil hipotesis bahwa Dukungan Rusia terhadap Pemerintahan Bashar Al-assad di Suriah dalam melawan ISIS (*Islamic state in iraq and syam*) adalah :

1. Adanya tuntutan dari rakyat Rusia untuk menjaga keamanan Nasional dari pengaruh Terorisme di Suriah.
2. Mempertahankan Mitra Kerja sama Ekonomi dan Militer di Suriah.
3. Adanya intervensi Amerika Serikat di Suriah

E. Metode Penulisan

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa library research dan interview dengan memanfaatkan data-data skunder yang pengumpulannya dari perpustakaan, buku-buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik, dan website yang telah diolah menjadi data untuk diklasifikasikan yang kemudian disusun, diringkas, dianalisa dan disimpulkan sesuai permasalahan skripsi yang diteliti.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dan kegunaan akademis yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah melakukan identifikasi dan mengetahui bagaimana Alasan dan faktor-faktor Rusia membantu Pemerintahan Bashar Al-Assad di Suriah dalam melawan ISIS, Dan pada umumnya tujuan penelitian ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar S1 pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

G. Jangkauan Penelitian

Penelitian dengan judul “Dukungan Rusia terhadap Pemerintahan Bashar Al-Assad dalam melawan ISIS” akan membahas tentang dukungan pemerintahan Bashar Al-Assad dalam melawan ISIS dari tahun 2011 hingga 2016, Dimana Rusia memperlihatkan dukungannya di PBB dalam melawan pemberontakan di Suriah, sedangkan Tindakan Rusia ini mendapat kecaman dari banyak Pihak, terutama dari Pihak Barat. Hal ini menandakan adanya kepentingan nasional Rusia di Suriah.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini menjadi sebuah karya tulis, penulis membagi dalam beberapa bab dimana diantara bab-bab tersebut saling berkaitan sehingga menjadi satu kesatuan utuh.

- Bab I menjelaskan mengenai pendahuluan yang terdiri dari Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka teori, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Kerangka Penulisan, Dan Daftar Pustaka.
- Bab II Tentang penjelasan dan Gambaran umum tentang Rusia dan Suriah, Hubungan Rusia dan Suriah, gambaran umum tentang ISIS, dan dinamika politik dan keamanan Rusia pasca kemunculan ISIS.
- Bab III Faktor-faktor yang melatarbelakangi Rusia dalam mendukung Pemerintahan Bashar al-Assad Dalam Melawan ISIS di Suriah.
- Bab IV Kesimpulan dan Penutup, berisi penyimpulan dan kata penutup yang dapat ditarik Dari Pembahasan-pembahasan dari bab-bab sebelumnya.

